

LAPORAN PENELITIAN



**Pendistribusian Bantuan Kompor Gas di Kota Bengkulu:
Pemihakan pada Masyarakat Miskin**

Oleh:

Dr. Hajar G. Pramudyasmono
Drs. Purwaka, M.Lis.
Drs. Asep Topan, M.Si.

Dibiayai oleh Dana RBA FISIP UNIB Tahun Anggaran 2011
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
No. 1540/UN.30.5/PL/2011 Tanggal 6 Juni 2011

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BENGKULU

November 2011

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN DANA DIPA FISIP UNIB TAHUN 2011

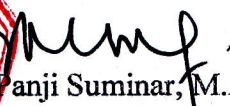
1. Judul Penelitian : Pendistribusian Bantuan Kompor Gas di Kota Bengkulu: Pemihakan pada Masyarakat Miskin
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Dr. Hajar G. Pramudyasmono
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19641106 199001 1 001
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : Ketua Jurusan Sosiologi
 - f. Bidang Keahlian : Sosiologi Pembangunan
 - g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Sosiologi
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu
 - i. Tim Peneliti :

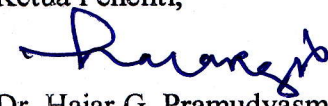
No.	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Drs. Purwaka, M.Lis.	Ilmu Perpustakaan	FISIP/Sosiologi	Universitas Bengkulu
2.	Drs. Asep Topan, M.Si.	Sosiologi Hukum	FISIP/Sosiologi	Universitas Bengkulu

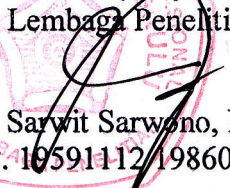
3. Jangka Waktu dan Pendanaan Penelitian:

- a. Waktu Penelitian : 6 Bulan
- b. Pendanaan : Rp 4.638.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)



Mengetahui:
Dekan FISIP UNIB,

Drs. Panji Suminar, M.A.
NIP. 19620216 198803 1 002

Bengkulu, 21 November 2011
Ketua Peneliti,

Dr. Hajar G. Pramudyasmono
NIP. 19641106 199001 1 001

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian UNIB,

Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum.
NIP. 19591112 198603 1 002

RINGKASAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui reaksi/tanggapan tokoh dan warga masyarakat setempat terhadap program konversi penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas (LPG atau elpiji). Selanjutnya penelitian ini ingin mengetahui apakah pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di Kelurahan Jembatan Kecil telah tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat miskin. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kriteria rumah-tangga yang layak mendapatkan bantuan menurut versi pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat kelurahan setempat, para Ketua RT dan warga masyarakat penerima bantuan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di Kelurahan Jembatan Kecil telah dirasa adil oleh tokoh dan warga masyarakat setempat karena penerima bantuan pada umumnya adalah masyarakat miskin, meskipun hingga pendistribusian gelombang kedua tidak semua rumah-tangga yang mengajukan permohonan diberi bantuan. Malahan setelah kompor dan tabung gas tersebut dibagikan kepada warga masyarakat ternyata ada beberapa kompor yang rusak dan tidak dapat ditukarkan karena di kantor kelurahan sudah tidak ada sisa (*stock*) lagi. Pihak konsultan utusan Pertamina telah menjanjikan akan memberikan bantuan kompor dan tabung gas 3 kg kepada warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, namun hingga penelitian ini dilakukan janji tersebut belum direalisasikan. Pada umumnya warga masyarakat Kelurahan Jembatan Kecil senang menerima bantuan kompor dan tabung gas tersebut dan langsung mempergunakannya meskipun pada awalnya ada perasaan was-was kalau-kalau terjadi ledakan. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa perangkat kelurahan, tokoh dan warga masyarakat setempat mengharapkan agar Pertamina segera menyalurkan bantuan kembali dan menjaga kualitas kompor serta tabung gas bantuan sehingga aman dipergunakan.

PRAKATA

Penelitian ini dilakukan atas biaya DIPA FISIP UNIB Tahun Anggaran 2011. Dengan memberikan alokasi dana, pimpinan fakultas berharap agar semua dosen FISIP UNIB mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian sebagai salah satu tuntutan dalam pengamalan Tri-Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, tim peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Dekan FISIP UNIB yang telah berinisiatif memberikan bantuan finansial demi kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Selanjutnya, tim peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para perangkat Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, beserta para tokoh masyarakat (Ketua Rukun Tetangga) dan warga masyarakat setempat atas partisipasinya dalam proses pengumpulan data dengan cara meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

Terakhir, ucapan terimakasih juga kami tujukan kepada Widya Sumarti dan Marsellina Fitri – keduanya adalah mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP UNIB – yang telah bersusah-payah membantu tim peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Semoga amal kebaikan semua pihak sebagaimana disebutkan di atas mendapatkan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, amiin.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : STUDI PUSTAKA	3
BAB III : METODE PENELITIAN	6
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	8
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	18
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	
1. Biodata Ketua Peneliti	22
2. Biodata Anggota Peneliti (I)	25
3. Biodata Anggota Peneliti (II)	27

BAB I: PENDAHULUAN

Latar-belakang

Minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Saat ini cadangan minyak dunia mulai menipis sehingga harganya semakin melambung. Pada dekade terakhir harga minyak di pasaran internasional naik dari US\$ 50 per barrel menjadi US\$ 70 per barrel, bahkan beberapa saat sebelumnya sempat mencapai US\$ 110 per barrel. Meskipun Indonesia merupakan salah satu pemasok minyak dunia, kenaikan harga ini tidak meningkatkan devisa sebab cadangan minyak di negeri ini pun juga telah berkurang. Sebaliknya, beban pemerintah Indonesia bertambah berat karena harus mensubsidi pengguna bahan bakar minyak. Oleh karena itu, sejak 2007 pemerintah melakukan sosialisasi konversi penggunaan bahan bakar dari minyak ke gas mengingat persediaan gas alam cair (LPG/elpiji, *Liquid Petroleum Gas*) di Indonesia masih cukup melimpah. Sebagai dasar hukum pelaksanaan konversi ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg. Program konversi ini dimaksudkan agar masyarakat berhemat dalam pemakaian energi sehari-hari. Apabila program ini berhasil maka pemerintah dapat menghemat subsidi antara Rp 15 hingga Rp 20 trilyun.

Selain meringankan beban pemerintah dalam mensubsidi bahan bakar, penggunaan kompor gas juga menguntungkan konsumen (masyarakat pemakai) karena biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada biaya pembelian minyak tanah. Berdasarkan perhitungan Pertamina, pengeluaran rumah-tangga untuk membeli minyak tanah selama 1 bulan (30 hari) adalah sebesar Rp 75.000,- sedangkan untuk pembelian elpiji tabung 3 kg hanya Rp 51.000,- sehingga konsumen akan menghemat Rp 24.000,-. Keuntungan lain dari pemakaian kompor gas adalah dapat mengurangi polusi udara karena tidak menimbulkan jelaga.

Kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas (elpiji) kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg. Kebijakan pembagian kompor gas dan tabung elpiji 3 kg gratis

kepada masyarakat miskin bertujuan agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pembelian kompor gas dan tabungnya. Meskipun target pendistribusian bantuan kompor gas dan tabung elpiji 3 kg ini adalah masyarakat miskin, di beberapa kelurahan di Kota Bengkulu masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Sebaliknya, beberapa keluarga yang tergolong tidak miskin justru mendapatkan bantuan. Melihat kenyataan seperti ini, penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh apakah bantuan kompor gas dan tabung elpiji 3 kg dari pemerintah (melalui Pertamina) telah tepat sasaran/diberikan kepada keluarga yang pantas dan berhak menerimanya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kriteria penduduk yang layak mendapat bantuan kompor gas, baik ditinjau dari perspektif penguasa (aparatur pemerintah) maupun masyarakat.
2. Mengungkapkan apakah pembagian bantuan kompor gas telah sesuai dengan keinginan pemerintah dan harapan masyarakat.

Keutamaan Penelitian

Manfaat dan keutamaan penelitian ini antara lain adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam pembagian bantuan kompor gas yang adil sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat.

BAB II: STUDI PUSTAKA

Harga minyak dunia terus meningkat sehingga subsidi minyak tanah (mitan) juga meningkat. Untuk menghemat APBN, minyak tanah dikonversi dengan gas (LPG atau elpiji). Kebijakan ini akhirnya melahirkan kebijakan lain, yaitu pembagian kompor dan tabung gas secara gratis kepada masyarakat. Dasar Pelaksanaan konversi minyak tanah menjadi gas antara lain:

1. Surat Menteri ESDM No. 3249/26/MEM/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Hasil Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Presiden mengenai diversifikasi Mitan ke LPG. Pertamina ditunjuk untuk melaksanakan konversi minyak tanah ke gas bagi konsumen rumah-tangga.
2. Surat Wakil Presiden RI No. 20/WP/9/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Konversi Pemakaian Mitan ke LPG.
3. Peluncuran pelaksanaan konversi Mitan ke LPG 3 kg oleh Wakil Presiden tanggal 08 Mei 2007 Jam 14.00 WIB di Kampung Makasar, Jakarta Timur.

Kebijakan pemberian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg ini tidak terlepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji yang dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, harga minyak dunia semakin meningkat sehingga subsidi minyak tanah pun juga meningkat. Kedua, ditaksir menghemat APBN hingga 17,5 trilyun rupiah. Berikutnya, gas alam di Indonesia masih melimpah. Terakhir, elpiji lebih ramah lingkungan daripada minyak tanah karena penggunaannya pada kompor gas tidak menjadikan alat masak terlalu kotor.

Untuk menutupi permintaan masyarakat yang tinggi, pemerintah mengimpor minyak. Harga minyak dunia jauh lebih tinggi dari harga minyak di Indonesia, sehingga pemerintah menutup selisih tersebut dengan memberi subsidi, salah satunya adalah subsidi minyak tanah. Program ini, menurut Menteri ESDM, akan bisa menurunkan subsidi minyak tanah dari sekitar Rp 35 trilyun menjadi 17,5 trilyun atau terjadi penghematan uang negara sebesar Rp 17,5 trilyun per tahun. Jumlah yang sangat besar dan dapat dialihkan ke sektor lain yang membutuhkan seperti sektor pendidikan (<http://www.presidentri.go.id>).

Bahan bakar gas relatif lebih bersih dan berpolusi lebih ringan dibandingkan dengan minyak tanah. Hasil pembakarannya tidak banyak menghasilkan asap hitam (CO₂ dan CO). Penghematan juga terjadi pada sisi konsumen atau masyarakat, yaitu penghematan senilai Rp 20.000,- hingga Rp 25.000,- per bulan per kepala keluarga, yang didapatkan dari hitungan jika menggunakan minyak tanah satu liter setara dengan 0,4 kg LPG (<http://www.antara.co.id/catidx/?ch=NAS>). Sebetulnya pemakaian LPG jauh lebih murah. Perhitungannya adalah sebagai berikut: harga minyak tanah sekarang Rp 7.000,- per liter (habis dalam waktu 1 hari), sehingga pengeluaran per bulan adalah Rp 7.000,- X 30 hari = Rp 210.000,- Sedangkan harga LPG tabung 3 kg adalah Rp 16.000,00 (habis dalam waktu 1 minggu), sehingga biaya yang harus dikeluarkan dalam satu bulan adalah Rp 16.000,- X 5 minggu = Rp 80.000,- per bulan.

Meskipun penggunaan bahan bakar gas lebih banyak keuntungannya dibanding dengan minyak tanah, kebijakan konversi ini masih menghadapi kendala. Penyebabnya antara lain adalah: 1) masyarakat yang sudah terlanjur nyaman menggunakan minyak tanah merasa terusik kenyamanannya; 2) kompor gas kurang akrab bagi sebagian besar masyarakat perdesaan, khususnya masyarakat miskin; 3) adanya ketakutan yang berlebihan bahwa kompor gas mudah meledak dan terbakar; dan 4) khawatir penghasilannya tak cukup untuk membeli isi ulang elpiji.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan kesalahan dalam pemasangan kompor dan tabung yang akhirnya menyebabkan ledakan tabung gas yang sangat merugikan. Sosialisasi yang telah berjalan selama ini hanya sebatas sosialisasi di media massa. Sosialisasi kurang melibatkan para *stakeholder*, termasuk masyarakat. Bahkan Pertamina sendiri tidak dilibatkan dalam sosialisasi. Pemerintah hanya menayangkan iklan berdurasi beberapa menit yang kurang efektif dan persuasif (<http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=139973>).

Akibat tidak siapnya masyarakat menggunakan kompor/tabung gas, penerima bantuan menjualnya pada orang yang hendak menggunakan sehingga mereka tetap mencari minyak tanah dan terjadi kelangkaan minyak tanah dimana-mana. Ada kemungkinan masyarakat akan kembali pada kebiasaan lama, yaitu menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak. Bila ini terjadi, ada kekhawatiran baru akan

munculnya kerusakan hutan karena menjadi objek penebangan untuk keperluan kayu bakar tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri atas empat sub-bab yaitu: pendekatan penelitian, lokasi dan responden penelitian, metode pengambilan data, dan teknik analisis data.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berkaitan dengan konteks penelitian, metode kualitatif akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme pembagian kompor dan tabung gas di Kota Bengkulu.

Lokasi dan Responden Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu. Informannya adalah aparatur pemerintah di tingkat kelurahan, tokoh masyarakat (Ketua Rukun Tetangga), dan warga masyarakat/keluarga penerima bantuan konversi kompor gas. Pengambilan sampel (penentuan informan) dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Ada empat RT (Rukun Tetangga) yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan tujuan tertentu. Pertama, RT 3 dipilih sebagai salah satu lokasi penelitian karena hampir semua rumah tangga yang diusulkan telah menerima bantuan kompor gas. Kemudian RT 7 juga dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan berita di surat kabar lokal pendistribusian bantuan kompor gas di RT tersebut bermasalah. Jadi peneliti bermaksud melakukan pengecekan ulang atas pemberitaan tersebut. Sedangkan, peneliti memilih RT 8 karena RT ini mendapatkan bantuan kompor gas paling sedikit dibanding dengan RT lainnya. Terakhir, RT 10 dipilih karena RT ini berdekatan dengan Kantor Lurah Jembatan Kecil sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan cek ulang tentang kebenaran informasi yang diberikan oleh aparat kelurahan dengan masyarakat penerima bantuan.

Metode Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh dari hasil pengamatan (*observation*) dan wawancara

(interview) dengan responden maupun informan. Sedangkan data sekunder akan digali dari penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pembagian kompor dan tabung gas, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun Kota dan Provinsi Bengkulu.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul melalui berbagai cara sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi pemilahan, kategorisasi, evaluasi, perbandingan, dan sintesa dari semua jawaban responden dan keterangan dari informan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Namun sebelumnya akan disajikan beberapa data monografi sehingga diperoleh gambaran mengenai peta sosial lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Kelurahan ini terletak di pusat kota, dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kebun Tebeng, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Panorama, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jalan Gedang, dan batas sebelah barat adalah Kelurahan Tanah Patah. Kelurahan Jembatan Kecil hanya berjarak 1 km dari Kantor Gubernur Bengkulu, dan 3 km dari Kantor Walikota Bengkulu. Luas Kelurahan Jembatan Kecil adalah 80 ha, terdiri atas pemukiman penduduk seluas 46 ha, pekarangan 12 ha, prasarana umum 12 ha, dan bangunan perkantoran 10 ha. Secara administratif, kelurahan ini dibagi menjadi tiga wilayah Rukun Warga (RW) dan sebelas Rukun Tetangga (RT). Ada 859 keluarga yang mendiami Kelurahan Jembatan Kecil dengan total penduduk 4.721 jiwa terdiri atas 2.484 laki-laki dan 2.237 perempuan. Rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Keadaan Penduduk Kelurahan Jembatan Kecil Berdasarkan RT (Rukun Tetangga), KK (Kepala Keluarga), dan Jenis Kelamin, 2011

RT	KK	LK	PR	Jumlah
1	55	143	121	264
2	77	206	186	392
3	103	273	315	588
4	61	176	136	312
5	87	241	213	454
6	93	316	268	584
7	81	221	185	406
8	82	234	202	436
9	69	252	185	437
10	64	181	207	388
11	78	298	219	457
Jumlah	850	2.484	2237	4.721

Sumber: Monografi Kelurahan Jembatan Kecil, 2011.

Mayoritas penduduk Kelurahan Jembatan Kecil (4.545 orang atau 96%) memeluk agama Islam. Hanya beberapa orang yang beragama Katholik, Protestan, atau pun Budha. Selanjutnya, bila ditinjau dari mata pencahariannya, penduduk kelurahan ini cukup heterogen pekerjaannya seperti terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2: Keadaan Penduduk Kelurahan Jembatan Kecil Berdasarkan Mata Pencaharian, 2011

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	433
2.	Pensiunan PNS	40
3.	TNI/Polisi	25
4.	Pensiunan TNI/Polisi	10
5.	Karyawan Swasta	450
6.	Pedagang	413
7.	Penjahit	9
8.	Tukang Batu	22
9.	Tukang Kayu	18
10.	Montir	36
11.	Sopir	35
12.	Wiraswasta	112
13.	Petani	125
14.	Buruh	626

Sumber: Monografi Kelurahan Jembatan Kecil, 2011.

Dari data di atas terlihat bahwa tidak semua penduduk Kelurahan Jembatan Kecil kuat perekonomiannya. Masih banyak penduduk yang kurang mampu (miskin), terutama mereka yang bekerja sebagai tukang batu, tukang kayu, petani, dan buruh. Oleh karena itu, kelurahan ini layak menjadi salah satu sasaran pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas dengan memberikan bantuan kompor dan tabung gas kepada keluarga miskin.

Pembagian bantuan kompor gas di Kelurahan Jembatan Kecil telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pertamina. Dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas ini pemerintah memberikan mandat kepada Pertamina untuk mendistribusikan bantuan kompor dan tabung gas 3 kg kepada keluarga yang berhak menerima. Langkah pertama yang dilakukan Pertamina adalah melakukan pendataan guna menentukan keluarga (rumah-tangga) yang layak mendapatkan bantuan. Pertamina mengutus konsultan swasta independen untuk terjun

ke lapangan. Konsultan langsung menemui setiap Ketua RT tanpa melalui perangkat kelurahan. Selanjutnya konsultan meminta bantuan Ketua RT untuk membagikan angket/formulir permohonan kepada setiap keluarga yang ingin mendapatkan bantuan kompor gas. Setelah diisi oleh warga, formulir tersebut dikumpulkan kembali kepada konsultan melalui Ketua RT masing-masing. Formulir yang dikumpulkan harus disertai dengan fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat keterangan domisili. Selain didistribusikan kepada unit keluarga, bantuan kompor dan tabung gas 3 kg juga dibagikan kepada para pengusaha kecil yang bergerak di bidang penjualan makanan matang, seperti penjual bakso dan penjual makanan gorengan. Mereka berhak mendapatkan bantuan dua unit kompor dan tabung gas 3 kg per keluarga. Perlengkapan administrasi yang harus mereka kumpulkan selain sama dengan dokumen yang dikumpulkan oleh keluarga biasa juga ditambah dengan surat keterangan usaha. Penentuan siapa saja yang mendapatkan bantuan dilakukan oleh konsultan, sedangkan pihak kelurahan hanya dilibatkan sebatas pendistribusian saja.

Sebagaimana dikemukakan pada Bab I, penelitian ini bertujuan mengetahui tanggapan aparatur pemerintah, tokoh masyarakat dan warga masyarakat terhadap pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di Kelurahan Jembatan Kecil. Oleh karena itu, data dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat kelurahan sebagai wakil aparatur pemerintah, Ketua RT mewakili tokoh masyarakat, dan warga masyarakat sendiri selaku penerima bantuan. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya mengungkapkan pandangan ketiga pihak sebagaimana tersebut di atas dalam mengidentifikasi kriteria penduduk yang layak mendapat bantuan. Uraian berikut berturut-turut memaparkan tanggapan aparatur kelurahan, Ketua RT dan warga Kelurahan Jembatan Kecil terhadap program konversi minyak tanah ke elpiji.

Tanggapan Aparatur Pemerintah Terhadap Pendistribusian Bantuan

Berdasarkan keterangan Kepala Kelurahan Jembatan Kecil (wawancara, Oktober 2011) dapat diketahui bahwa bantuan kompor/tabung gas 3 kg dari pemerintah kepada masyarakat di kelurahan ini dilakukan dalam dua periode. Pada gelombang pertama diberikan bantuan sebanyak 186 unit, sedangkan 129 unit lainnya dibagikan pada gelombang kedua sehingga keseluruhannya sebanyak 315 unit. Satu unit diperuntukkan

bagi satu keluarga, sehingga ada 315 keluarga atau 37% dari total keluarga yang ada telah mendapat bantuan kompor dan tabung gas. Jumlah ini, menurut Kepala Kelurahan Jembatan Kecil, belum sesuai dengan pengajuan masyarakat sebab 70% keluarga di kelurahan ini mengembalikan formulir permohonan dengan harapan akan mendapatkan bantuan. Konsultan menjanjikan bahwa semua keluarga yang mengajukan permohonan bantuan akan mendapatkan kompor dan tabung gas 3 kg, namun kenyataannya hingga saat ini bantuan tersebut tidak/belum berlanjut.

Selanjutnya, dari pengamatan dan wawancara dengan perangkat Kelurahan Jembatan Kecil dapat diketahui bahwa di kantor kelurahan tersebut tidak ada kompor dan tabung gas yang tersisa. Semua bantuan kompor dan tabung gas telah didistribusikan kepada masyarakat. Bagi keluarga yang mendapat jatah bantuan tetapi pada saat pembagian tidak diambil maka bantuan langsung dilimpahkan kepada warga lain yang mau memakai kompor dan tabung gas tersebut. Pendistribusian sebagian kompor gas tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena ada beberapa keluarga yang tergolong kaya mendapatkan bantuan. Tidak ada sanksi atau tindakan ketika pendistribusian kompor gas tidak tepat sasaran karena pihak konsultan yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan kompor gas tersebut. Pihak kelurahan hanya membantu menyalurkan bantuan berdasarkan kartu panggilan yang dibagikan oleh konsultan atas nama Pertamina kepada warga masyarakat.

Terakhir, pihak kelurahan mengharapkan agar Pertamina segera merealisasikan bantuan kompor dan tabung gas 3 kg tahap ketiga kepada warga sebagaimana dijanjikan oleh konsultan karena warga yang telah mengumpulkan formulir permohonan menunggu-nunggu dan selalu menanyakan hal ini kepada perangkat kelurahan. Warga masyarakat sangat mengharapkan bantuan kompor dan tabung gas ini karena harga minyak tanah dirasa sangat mahal dan untuk mendapatkan minyak tanah juga semakin sulit.

Tanggapan Tokoh Masyarakat Terhadap Pendistribusian Bantuan

Untuk mengetahui tanggapan tokoh masyarakat terhadap pendistribusian bantuan kompor dan tabung 3 kg kepada warga masyarakat di Kelurahan Jembatan Kecil,

peneliti (tenaga lapangan) melakukan wawancara dengan Ketua RT 3, Ketua RT 7, Ketua RT 8, dan Ketua RT 10.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT 3 dapat diketahui bahwa di wilayah RT ini terdapat 119 keluarga dan hanya 63 keluarga yang mengajukan bantuan. Pada tahap pertama telah didistribusikan 19 unit dan tahap kedua sebanyak 43 unit, sehingga 62 keluarga atau hampir semua rumah-tangga yang mengajukan bantuan di wilayah tersebut telah mendapatkan bantuan kompor dan tabung gas 3 kg. Ketua RT 3 mengatakan bahwa warga masyarakat di wilayahnya merasa senang mendapatkan bantuan tersebut karena semakin mahal dan langkanya minyak tanah. Alasan ini pulalah yang mendorong masyarakat untuk memakai kompor gas. Dari 62 unit kompor gas yang dibagikan, ada tiga unit yang ketahuan rusak setelah diterima oleh warga masyarakat. Kompor yang rusak tersebut tidak dapat digunakan dan tidak dapat ditukarkan di kantor kelurahan sebab sudah tidak ada sisa (*stock*) lagi.

Lokasi selanjutnya yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah RT 7. Di RT ini terdapat 60 keluarga dan hanya 40 keluarga yang mengembalikan formulir untuk mendapatkan bantuan kompor dan tabung gas 3 kg. Dari 40 keluarga yang mengajukan bantuan, hingga tahap kedua hanya 20 keluarga atau 50% yang mendapatkan bantuan. Seperti pada RT lainnya, warga RT 7 sangat senang menerima bantuan kompor dan tabung gas 3 kg tersebut. Namun ada beberapa warga yang marah karena tidak mendapatkan bantuan meskipun mereka telah mengembalikan formulir permohonan lengkap dengan dokumen persyaratannya. Di lain pihak, ada dua penerima bantuan yang tidak memanfaatkan kompor gas bantuan untuk memasak karena kompor gas bantuan tersebut diberikan kepada saudaranya dan satu penerima lainnya memberikan bantuan kompor gas tersebut kepada anaknya.

Wilayah RT 8 paling sedikit mendapatkan bantuan. Berdasarkan keterangan Ketua RT setempat dapat diketahui bahwa jumlah keluarga di wilayah ini adalah 80 dan kesemuanya mengajukan permohonan bantuan, namun untuk pendistribusian tahap pertama hanya delapan keluarga yang mendapat bantuan sedangkan pada tahap kedua hanya 10 keluarga. Ini berarti keluarga yang mendapat bantuan hanya 22,5% dari keseluruhan keluarga yang ada di wilayah tersebut. Ketua RT 8 mengemukakan bahwa pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di wilayahnya sudah sesuai

prosedur/ketentuan yang berlaku dan memihak pada keluarga miskin. Tidak ada penyimpangan dalam pendistribusian tersebut, namun Ketua RT tersebut masih menyangkan masih adanya penyeleksian dari konsultan yang dinilai kurang transparan sehingga masih banyak keluarga di RT ini yang belum mendapatkan bantuan.

Selanjutnya, Ketua RT 8 mengatakan bahwa pada awalnya masyarakat di wilayahnya merasa takut menggunakan kompor gas mengingat gencarnya berita di media massa yang mengekspos kasus-kasus ledakan kompor/tabung gas 3 kg bantuan pemerintah. Namun setelah adanya sosialisasi tentang cara penggunaan kompor gas yang benar dari Pertamina menjelang dibagikannya bantuan kompor dan tabung gas 3 kg tersebut maka rasa takut warga masyarakat calon penerima bantuan mulai berkurang. Kompor gas yang telah dibagikan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk memasak, kecuali kompor yang rusak. Penerima bantuan yang kompornya rusak tidak dapat menukarkannya ke kantor kelurahan karena sudah tidak ada persediaan lagi. Akibatnya, kompor gas yang rusak tersebut disimpan di rumah oleh warga penerima bantuan sambil menunggu pembagian tahap ketiga untuk ditukarkan. Ketua RT 8 berharap agar pemerintah segera merealisasikan bantuan tahap ketiga sehingga keluarga yang belum kebagian jatah segera mendapatkan bantuan.

Terakhir, dari wawancara dengan Ketua RT 10 dapat diketahui bahwa jumlah rumah-tangga di RT 10 adalah 96 keluarga dan yang mengajukan permohonan bantuan sebanyak 56 keluarga, namun hanya 30 keluarga yang mendapat bantuan pada tahap pertama dan tiga keluarga pada tahap kedua. Meskipun tidak semua rumah-tangga yang mengajukan permohonan mendapatkan bantuan, pendistribusian bantuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran karena berpihak pada keluarga miskin. Menurut Ketua RT 10, warganya merasa puas dan senang menerima bantuan dari pemerintah walaupun kompor dan tabung gas tersebut belum pernah dipergunakan karena takut terjadi ledakan. Selanjutnya, Ketua RT 10 menyangkan adanya prosedur penyeleksian calon penerima bantuan yang dilakukan oleh konsultan yang dinilai kurang transparan. Oleh karena itu, Ketua RT tersebut menyarankan agar konsultan memperbaiki kinerjanya sehingga pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas dirasa lebih adil oleh masyarakat.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Pendistribusian Bantuan

Untuk mengetahui tanggapan warga masyarakat terhadap pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di Kelurahan Jembatan Kecil, peneliti (dibantu tenaga lapangan) melakukan wawancara dengan 10 orang informan yang sekaligus merupakan penerima bantuan yaitu masing-masing dua orang dari RT 3, RT 7, RT 8, RT 9 dan RT 10.

Secara umum, semua informan menyatakan bahwa mereka (penerima bantuan) sangat senang menerima bantuan kompor dan tabung gas dari pemerintah. Tidak ada pungutan dari pihak mana pun dalam pendistribusian bantuan tersebut dan kompor telah dibagikan kepada warga masyarakat yang mendapatkan surat panggilan dalam keadaan lengkap dengan tabung gas, selang dan regulatornya, meskipun setelah diserahkan baru diketahui ada beberapa kompor yang rusak dan tidak ada penggantinya.

Mula-mula sebagian penerima bantuan ragu dan takut menggunakan kompor dan tabung gas 3 kg tersebut, jangan-jangan meledak. Oleh karena itu, kompor dan tabung gas yang mereka terima hanya disimpan dan tidak pernah dipergunakan. Namun setelah tidak ada lagi pemberitaan mengenai kasus ledakan kompor gas bantuan di media massa maka para penerima bantuan mulai yakin bahwa kompor dan tabung gas yang diterimanya aman sehingga mereka berani menggunakannya, apalagi minyak tanah mulai susah diperoleh dan harganya semakin mahal.

Walaupun beberapa penerima bantuan pada awalnya meragukan kualitas dan keamanan kompor dan tabung gas 3 kg, salah satu ibu rumah-tangga di RT 3 yang diwawancarai dalam penelitian ini mengatakan bahwa kompor dan tabung gas yang diterimanya langsung dipergunakan untuk memasak dengan menggunakan selang yang dibelinya sendiri agar lebih aman penggunaannya. Dua informan lainnya yang masing-masing berdomisili di RT 3 dan di RT 8 juga mengemukakan bahwa begitu diambil dari kantor kelurahan, kompor dan tabung gas 3 kg bantuan pemerintah tersebut langsung diserahkan kepada istrinya dan digunakan untuk memasak karena menurutnya lebih irit daripada menggunakan kompor minyak tanah.

Selanjutnya, dari wawancara dengan dua orang informan di RT 7 dapat diketahui bahwa mereka dan para penerima bantuan lain di sekitarnya merasa senang mendapatkan bantuan kompor gas lengkap dengan tabung isi elpiji 3 kg dari pemerintah, meskipun pada akhirnya kompor gas bantuan tersebut tidak mereka pergunakan sendiri. Satu informan menyatakan bahwa kompor gas bantuan tersebut dipergunakan oleh anaknya yang tinggal di kebun, sedangkan infoman lainnya mengaku bahwa kompor yang diterimanya tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan dan terpaksa tetap memasak dengan menggunakan kompor minyak meskipun harga minyak tanah mahal. Oleh karena itu, informan ini menyarankan agar kualitas kompor gas ditingkatkan dan dicek ulang sebelum dibagikan untuk mengetahui rusak atau tidaknya agar dapat dipergunakan oleh penerima bantuan.

Perasaan senang dan puas terhadap pendistribusian kompor dan tabung gas 3 kg juga dirasakan oleh warga RT 9 yang menerima bantuan, meskipun — menurut pengakuan salah satu informan — kompor yang diterimanya hingga penelitian ini dilakukan belum pernah dipergunakan karena dia masih memiliki cadangan (*stock*) minyak tanah, namun dia akan mempergunakan kompor gas bantuan tersebut apabila persediaan minyak tanahnya sudah habis. Informan lainnya menyatakan bahwa kompor yang diterima telah dipergunakan untuk memasak karena lebih irit bila dibandingkan dengan menggunakan kompor minyak tanah. Selanjutnya, kedua responden tersebut berpendapat bahwa pembagian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di RT-nya telah adil dan tepat sasaran karena diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki perekonomian menengah ke bawah. Namun kedua responden tersebut masih berharap agar pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg tersebut dilanjutkan agar merata karena di RT 9 masih banyak warga yang belum kebagian bantuan. Di samping itu, mereka juga mengharapkan agar pemerintah (dalam hal ini Pertamina) selalu menjaga mutu dan keamanan kompor dan tabung gas yang didistribusikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kasus-kasus ledakan.

Meskipun pendistribusian bantuan kompor gas secara umum sudah tepat sasaran, di RT 10 ada satu rumah-tangga yang mendapatkan bantuan dua kompor gas sehingga menurut salah satu informan dalam penelitian ini pembagian tersebut dirasa kurang

adil. Ini adalah salah satu kelemahan mekanisme pendistribusian bantuan yang berdasarkan pada KK (Kartu Keluarga). Bisa saja satu rumah-tangga memiliki dua KK sebab dalam rumah-tangga tersebut memang ada dua kepala keluarga. Selain itu, berdasarkan aturan, rumah-tangga yang mempunyai usaha kecil (berjualan makanan matang) mempunyai hak dan peluang untuk mendapatkan bantuan dua unit kompor gas, sehingga tidak salah apabila ada satu rumah-tangga yang mendapatkan bantuan dua unit kompor gas. Selanjutnya, informan sebagaimana dikemukakan di atas (seorang ibu rumah-tangga yang bekerja sebagai PNS) menyarankan agar konsultan melihat kondisi fisik rumah calon penerima bantuan dalam proses seleksi dan jangan hanya berdasarkan formulir isian sehingga penyeleksian tersebut lebih akurat dan pendistribusian bantuan benar-benar tepat sasaran. Meskipun informan ini memandang adanya ketidak-adilan dalam pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di RT-nya, dia sendiri mendapatkan bantuan padahal dia sudah memiliki kompor gas yang menggunakan tabung 12 kg (beli sendiri) sehingga kompor gas bantuan tersebut hanya disimpan dan tidak pernah dipergunakan.

Informan lain dari RT 10 adalah seorang nenek yang telah berusia 65 tahun dan bekerja sebagai tukang pijat. Menurut pengakuannya, semula dia merasa takut memasak dengan menggunakan kompor dan tabung gas bantuan pemerintah. Setelah diberitahu (mendapatkan surat pemberitahuan) bahwa dia mendapatkan jatah bantuan maka kompor dan tabung gas bantuan pemerintah tersebut diambil juga, namun langsung diberikan kepada anaknya yang sudah berkeluarga dan tinggal/bekerja di kebun. Meskipun informan ini tidak mempergunakan sendiri kompor gas bantuan pemerintah, menurutnya pendistribusian bantuan tersebut telah adil karena yang diberi bantuan adalah keluarga yang tidak mampu (miskin). Terakhir, informan ini berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan kompor dan tabung gas lagi kepadanya pada tahap ketiga karena harga minyak tanah semakin mahal dan sulit didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa menurut tokoh dan warga masyarakat setempat penyaluran bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di Kelurahan Jembatan Kecil telah adil dan tepat sasaran meskipun sampai pendistribusian gelombang kedua tidak semua warga yang mengajukan permohonan akhirnya mendapatkan bantuan. Mereka menilai bahwa pemberian

bantuan ini telah adil dan tepat sasaran karena yang mendapatkan bantuan adalah keluarga dari kalangan perekonomian menengah ke bawah.

Di lain pihak, pemerintah melalui Pertamina telah mensosialisasikan buku tanya-jawab yang antara menjelaskan bahwa sasaran konversi penggunaan minyak tanah ke gas adalah ibu rumah-tangga dan usaha mikro (penjual makanan matang) yang masih menggunakan kompor minyak tanah. Buku tersebut tidak mencantumkan secara tegas bahwa penerima bantuan adalah keluarga miskin tetapi hanya memberikan batasan bahwa rumah-tangga penerima bantuan harus memiliki pengeluaran di bawah Rp 1,5 juta per bulan. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, baik rumah-tangga maupun usaha mikro, adalah mereka sebagai pengguna mitan (minyak tanah) untuk bahan bakar memasak.

Meskipun variabel pengeluaran dan usaha mikro dapat dijadikan indikator kemiskinan (keluarga yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah), ada kemungkinan hasil penyeleksiannya bias. Suatu rumah-tangga yang tidak miskin, misalnya, bisa saja memiliki pengeluaran di bawah Rp 1,5 juta apabila rumah-tangga tersebut hanya terdiri atas satu orang. Demikian pula keluarga yang tidak miskin ada kemungkinan memiliki usaha mikro yang proses produksinya masih menggunakan kompor minyak tanah sehingga usaha mikro tersebut berhak mendapatkan bantuan. Akibatnya, keluarga yang menurut persepsi tokoh dan warga masyarakat tidak berhak mendapatkan bantuan bisa saja oleh konsultan dipilih (lolos seleksi) sebagai penerima bantuan sehingga ada kesan bahwa pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg tersebut tidak adil dan kurang tepat sasaran, meskipun jarang terjadi. Oleh karena itu, selain berdasarkan pada data yang ditulis di formulir permohonan, hendaknya konsultan dalam proses penyeleksian calon penerima bantuan juga melakukan survei dengan cara mendatangi rumah warga masyarakat untuk melihat langsung kondisi perekonomian calon penerima bantuan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg oleh pemerintah dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak, yakni: Pertamina, konsultan, Ketua RT, dan aparat kelurahan. Pola distribusinya adalah pemerintah pusat bekerjasama dengan Pertamina, kemudian Pertamina mengutus konsultan untuk menemui setiap Ketua RT dalam rangka pendataan dengan cara membagikan angket/formulir permohonan. Tidak ada diskriminasi dalam pembagian formulir. Semua rumahtangga yang ingin mendapatkan bantuan, baik miskin maupun mampu, diberi formulir. Setelah diisi, formulir tersebut diserahkan kembali kepada konsultan melalui Ketua RT, dengan melampirkan fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat keterangan domisili. Bagi pemilik usaha makanan kecil berhak mendapatkan bantuan dua unit dengan melampirkan surat keterangan usaha. Penentuan rumahtangga yang diberi bantuan ditentukan oleh konsultan, sedangkan pihak kelurahan hanya dilibatkan dalam pendistribusian setelah bantuan kompor dan tabung gas datang.

Berdasarkan keterangan aparat Kelurahan Jembatan Kecil, pemberian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di kelurahan tersebut hingga tahap kedua (saat penelitian ini dilakukan) baru terealisasi sekitar 50% dari jumlah yang dijanjikan Pertamina. Pertamina menjanjikan akan memberikan bantuan kompor dan tabung gas 3 kilogram kepada warga masyarakat Kelurahan Jembatan Kecil melalui tiga gelombang, sehingga nantinya 70% dari 850 KK (Kepala Keluarga) atau 595 KK mendapatkan bantuan, tetapi kenyataannya hingga tahap kedua baru 315 keluarga yang telah mendapat bantuan. Pembagian bantuan ini telah tepat sasaran dan kriteria penerima bantuan telah sesuai dengan ketentuan pemerintah, hanya sebagian kecil penerima bantuan saja yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Menurut para Ketua RT, pendistribusian bantuan kompor dan tabung gas 3 kg di wilayahnya sudah tepat sasaran karena penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Meskipun pada awalnya ada sebagian warga yang

khawatir terhadap bahaya penggunaan kompor gas bantuan, para penerima bantuan pada umumnya merasa senang dan puas dengan pendistribusian bantuan tersebut. Namun para Ketua RT menyangkan adanya penyeleksian oleh konsultan dalam menentukan rumahtangga penerima bantuan, padahal semua persyaratan telah dipenuhi oleh seluruh rumahtangga yang mengajukan permohonan bantuan.

Menurut warga penerima bantuan, pembagian bantuan kompor dan tabung gas 3 kilogram di Kelurahan Jembatan Kecil sudah dirasakan tepat sasaran, adil, dan berpihak pada keluarga yang kurang mampu. Dalam pembagiannya sama sekali tidak ada pungutan. Para penerima bantuan juga merasa senang menerima bantuan karena langkanya minyak tanah dan kalau pun tersedia harganya dirasa sangat mahal, yakni Rp 10.000,- per liter. Hanya ada beberapa warga yang menganggap pendistribusian bantuan tersebut tidak adil karena ada rumahtangga/keluarga yang diberi bantuan dua perangkat kompor gas. Meskipun pembagiannya telah baik, beberapa warga masih mengkhawatirkan kualitas kompor dan tabung gas bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kasus-kasus ledakan kompor/tabung gas yang diberitakan oleh media massa dan adanya kompor/tabung gas yang tidak layak pakai. Namun di akhir penelitian ini, kekhawatiran tersebut sudah mulai hilang.

Saran

Dari kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran kepada pemerintah dan Pertamina. Pertama, Pertamina melalui konsultannya hendaknya lebih banyak lagi melibatkan aparat kelurahan terutama dalam melakukan cek ulang terhadap kondisi perekonomian calon penerima bantuan untuk memastikan bahwa bantuan kompor dan tabung gas 3 kg diberikan kepada keluarga miskin. Kedua, Pertamina hendaknya segera memenuhi janjinya untuk memberikan bantuan kompor dan tabung gas 3 kg kepada 70% keluarga di Kelurahan Jembatan Kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (termasuk Pertamina) dalam memenuhi rasa keadilan yang lebih luas. Ketiga, berhubung masih ada warga masyarakat yang trauma dengan informasi negatif tentang ledakan kompor/tabung gas bantuan maka sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan sebelum bantuan diberikan. Selanjutnya, Pertamina perlu menginstruksikan kepada para konsultan agar menjelaskan kepada

warga masyarakat secara transparan mengenai kriteria calon penerima bantuan. Terakhir, Pertamina harus meningkatkan kualitas kompor dan tabung gas yang dibagikan untuk menjaga keamanan (keselamatan) dan kenyamanan warga masyarakat penerima bantuan. Peningkatan kualitas kompor dan tabung gas yang dibagikan juga akan sangat membantu kesuksesan program pemerintah dalam melakukan konversi penggunaan minyak tanah ke gas.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (Maret 2009), *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi*, Online <http://www.bps.go.id> [diakses 1 April 2010].
- Kurniawan, Luthfi J. & Puspitosari, Hesti, 2007, *Wajah Buram Pelayanan Publik*, In-Trans Publishing, Malang.
- Nugroho, Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*, P.T. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Subarsono, A.G., 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta.

BIODATA KETUA PENELITI

I. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap dan Gelar	Dr. Hajar G. Pramudyasmono
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kediri, 06 November 1964
3.	NIP	19641106 199001 1 001
4.	Jabatan Fungsional	Lektor
5.	Alamat Kantor	Sosiologi FISIP UNIB, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu – 38371
6.	Alamat Rumah	Jl. Unib Permai II/51 Pematang Gubernur, Bengkulu – 38125
7.	Nomor Telepon dan Email	0813 9220 5831; hajargp@yahoo.com.au
8.	Mata kuliah yang diampu	1. Pengantar Sosiologi (S1) 2. Metode Penelitian Kuantitatif (S1) 3. Desain Penelitian (S1) 4. Teori dan Isu Pembangunan (S2) 5. Metode Penelitian Administrasi (S2)

II. Riwayat Pendidikan

1.	Jenjang Pendidikan	S1	S2	S3
2.	Nama Perguruan Tinggi dan Lokasi	UGM, Yogyakarta	Flinders University, Australia	Flinders University, Australia
3.	Gelar	Drs.	M.A.	Dr. (Ph.D)
4.	Tahun Tamat	1988	1999	2009
5.	Bidang Studi	Sosiologi	Studi Pembangunan	Studi Pembangunan

III. Pengalaman Profesional

No.	Jabatan	Instansi	Periode
1.	Ketua Jurusan Sosiologi	FISIP UNIB	2010 – 2013
2.	Ketua Pusat Kajian Bencana	FISIP UNIB	2010 – sekarang
3.	Sekretaris Pusat Studi Pengembangan Keluarga	ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia), Bengkulu	1992 – 1996
4.	Sekretaris Program Studi Sosiologi	FISIP UNIB	1992 – 1993

IV. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2011	Model dan Akuntabilitas Tata-Kelola Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu Berbasis Pemangku Kepentingan	DIPA UNIB
2.	2011	Visualisasi Adat Asli pada Ritual Pernikahan dan <i>Cilok Kai</i> dalam Komik Kebudayaan Sebagai Strategi Pewarisan Budaya Bagi Generasi Muda	Dirjen Dikti, Kemendiknas

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	2010	Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal	Dirjen Dikti Kemendiknas
4.	2002 – 2006	Ph.D. Thesis: Decentralisation and National Integration in Indonesia: A Case Study of Post-New Order Riau	AusAID & Flinders University
5.	1999 – 2000	Karakteristik Penduduk Miskin dan Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan pada Masyarakat Bengkulu	DIK-S UNIB
6.	1998 – 1999	M.A.Thesis: A Critique of the Takukesra Program: Alleviating Poverty in Indonesia	Mandiri
7.	1997	B.A. Honours Thesis: The IDT Program and Poverty Alleviation in Indonesia	Mandiri
8.	1995	Karakteristik Anggota Kejar Paket A dan Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Penerimaan, Kelangsungan dan Penghentianannya	P4M/DPPM Dirjen Dikti Depdikbud

V. Publikasi

No.	Judul Artikel/Buku	Nama Jurnal Ilmiah/ Penerbit	Vol. & Halaman
1.	Decentralisation and National Integration in Indonesia: A Case Study of Post-New Order Riau	Lambert Academic Publishing, Germany.	ISBN: 978-3-8443-1768-8.
2.	The Reform Agenda in Riau: Decentralisation and Its Consequences.	Jurnal AKSES, FISIP UNIB, Bengkulu, ISSN: 1693 – 8356.	Vol. VI, No.2, Agustus 2009, hlm. 118 – 130.
3.	The Effectiveness of the Takukesra Program in Alleviating Poverty in Indonesia.	Jurnal PENELITIAN, Lembaga Penelitian UNIB, Bengkulu, ISSN: 0852 – 405X.	Vol. VI, No. 18, Juli 2000, hlm. 7 – 12.
4.	Efektifitas Program IDT dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia.	Jurnal NUANSA INDONESIA, PPIA South Australia, ISSN: 1328 – 0465.	Vol. II, No. 2, Januari 1998, hlm. 51 – 55.
5.	Karakteristik Anggota Kejar Paket A dan Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Penerimaan, Kelangsungan, dan Keberhentiannya.	Jurnal TRIADIK, FKIP UNIB, Bengkulu, ISSN: 8053 – 8301.	No. 1 Tahun I, Maret 1996, hlm. 8 – 13.

VI. Tugas pokok yang diemban dalam penelitian ini:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian dari awal hingga akhir.
2. Mengurus perizinan penelitian ke instansi pemerintah/Dinas terkait serta mempersiapkan lokasi penelitian (mengontak responden dan informan) untuk diwawancarai.
3. Menyajikan pokok pikiran yang terkandung dalam proposal dan hasil penelitian di forum ilmiah/seminar.
4. Menyusun laporan akhir penelitian, mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal maupun internet, dan mendistribusikan laporan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila ada pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Maret 2011
Ketua Peneliti,

Dr. Hajar G. Pramudyasmono
NIP. 19641106 199001 1 001

BIODATA ANGGOTA PENELITI

I. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap dan Gelar	Drs. Purwaka, M.Lis.
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sleman, 17 November 1963
3.	NIP	19631117 198803 1 013
4.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
5.	Alamat Kantor	Sosiologi FISIP UNIB, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu – 38371
6.	Alamat Rumah	Jl. Unib Permai II/45 Pematang Gubernur, Bengkulu – 38125
7.	Nomor Telepon dan Email	0813 2863 9797
8.	Mata kuliah yang diampu	1) Sosiologi Kota-Kota Pesisir 2) Dinamika Masyarakat Transmigran

II. Riwayat Pendidikan

1.	Jenjang Pendidikan	S1	S2
2.	Nama Perguruan Tinggi dan Lokasi	UGM, Yogyakarta	Dalhousia University, Canada
3.	Gelar	Drs.	M.Lis.
4.	Tahun Tamat	1987	1994
5.	Bidang Studi	Sosiatri	Library & Information

III. Pengalaman Profesional

No.	Jabatan	Instansi	Periode
1.	Sekretaris UPT Perpustakaan	UNIB	2008 – sekarang
2.	Ketua Prodi D3 Perpustakaan	FISIP UNIB	1999 – 2007

IV. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2010	Vandalisme di UPT Perpustakaan UNIB	--
2.	2009	Evaluasi Penggunaan Dana BOS	--
3.	2009	Evaluasi Layanan Pengguna di UPT Perpustakaan UNIB	--

V. Publikasi

No.	Judul Artikel	Nama Jurnal Ilmiah	Vol. & Halaman
1.	Evaluasi Layanan Pengguna di UPT Perpustakaan UNIB	Jurnal Penelitian UNIB	Tahun 2010
2.	Studi Penjajagan Pendirian Perpustakaan Komunitas di Pondok Kelapa, Bengkulu Utara	Jurnal Multisciences UMB	Tahun 2009

VI. Tugas pokok yang diemban dalam penelitian ini:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data di lapangan.
2. Membantu Ketua Peneliti dalam menyusun laporan akhir penelitian.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila ada pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Maret 2011
Anggota Peneliti,

Drs. Purwaka, M.Lis.
NIP. 19631117 198803 1 013

BIODATA ANGGOTA PENELITI

I. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap dan Gelar	Drs. Asep Topan, M.Si.
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tasikmalaya, 25 November 1961
3.	NIP	19611125 199803 1013
4.	Jabatan Fungsional	Lektor
5.	Alamat Kantor	Sosiologi FISIP UNIB, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu – 38371
6.	Alamat Rumah	Jl. Unib Permai IV Blok III No. 83 Bentiring, Bengkulu
7.	Nomor Telepon	081278773382
8.	Mata kuliah yang diampu	1) Pendidikan Kewarganegaraan 2) Pengembangan Sumberdaya Manusia 3) Struktur Sosial

II. Riwayat Pendidikan

1.	Jenjang Pendidikan	S1	S2
2.	Nama Perguruan Tinggi dan Lokasi	UGM, Yogyakarta	IPB, Bogor
3.	Gelar	Drs.	M.Si.
4.	Tahun Tamat	1987	2000
5.	Bidang Studi	Filsafat	Sosiologi Hukum

III. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2003	Studi Sosiologi- Antropologi Terhadap Desa Binaan <i>Bengkulu Regional Development Project (BRDP)</i> Prop. Bengkulu	Bappeda Provinsi Bengkulu
2.	2000	KASATUAN ADAT BANTEN KIDUL: Dinamika Masyarakat dan Budaya Sunda Kasepuhan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat	IPB
3.	2001	Manifestasi Nilai Gotong-royong Masyarakat Bengkulu dalam Sistem Kerja Pelaksanaan Acara <i>Bimbang Gedang</i>	UNIB

IV. Tugas pokok yang diemban dalam penelitian ini:

1. Membantu Ketua Peneliti dalam pengumpulan dan pengolahan data.
2. Membantu Ketua Peneliti dalam penyusunan laporan akhir penelitian.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila ada pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Maret 2011
Anggota Peneliti,

Drs. Asep Topan, M.Si.
NIP. 19611125 199803 1013